



PEMANFAATAN ENCENG GONDOK: Seorang warga menjemur batang tanaman enceng gondok (*Eichhornia crassipes*) yang dikumpulkan dari Danau Rawa Pening di Kelurahan Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/10). Warga memanfaatkan tanaman gulma tersebut untuk dijual sebagai bahan kerajinan ke wilayah Jateng, DIY, Jawa Barat, dan Bali seharga Rp 11.500 perikat (50 kg) basah dan Rp 6.000/kg kering.

KR-Antara/Aji Styawan

KR-Istimewa

DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 Positif Gairahkan Investasi

JAKARTA (KR) - Rencana distribusi vaksin Covid-19 ke masyarakat memberikan sentimen positif bagi perdagangan saham. Terlebih sudah dilakukan relaksasi terhadap PSBB di Jakarta, sehingga membuka peluang aktivitas ekonomi lebih baik.

Diharapkan rencana tersebut dapat dilaksanakan dan prosesnya tidak ada kendala, sehingga meningkatkan harapan terhadap keberhasilan mengatasi penyebaran Covid-19. "Saat ditemukan vaksin, market cenderung positif saat itu. Sehingga saat bersamaan terjadi relaksasi PSBB, waktu itu IHSG

sempat sekitar 4.800 dan sempat menyentuh di angka 5.180. Atau kenaikannya di angka 5-6 persen," ungkap CEO Sukor Securitas, Bernadus Setya Ananda Wijaya dalam bincang Editorial KR bersama wartawan Primaswolo Sudjono, Kamis (22/10). Bincang ini juga ditayangkan di Channel YouTube Ke-



Bernadus Wijaya

daulatan Rakyat TV. Bernadus yang berasal dari Yogya, menduduki posisi CEO di usia yang tergolong muda, 30 tahun. Ia dikenal

karena mendorong kaum milenial untuk ikut di bursa saham.

Menurut Bernadus, meski ada pertanda baik, namun para investor masih cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi. Karena takut adanya hambatan dalam pendistribusian vaksin itu sendiri. Selain itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yakni laporan keuangan kuartal III emiten-emiten, pemilihan Presiden di Amerika Serikat, yang akan sangat berdampak pada iklim investasi, baik di Amerika Serikat mau-

pun di Indonesia.

Dikemukakan pula, jika kesadaran masyarakat baik terhadap protokol kesehatan, dengan menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) dan menghindari kerumunan berjalan baik dan vaksin lancar, tentu saja, para investor akan melihat, "Oh penanganan Covid-19 di Indonesia mulai membaik". Dengan demikian masyarakat lebih kooperatif dan hasil akan sesuai ekspektasi yakni akan berdampak membaiknya iklim investasi di Indonesia. (Jon)-d

TIPS LIBURAN AMAN DARI COVID-19

Hindari Zona Merah, Jauhi Keramaian

JAKARTA (KR) - Meskipun Pemerintah meminta masyarakat agar sebisa mungkin tidak bepergian pada saat libur panjang 28 Oktober-1 November 2020 nanti untuk mencegah penyebaran Covid-19, namun diperkirakan mobilitas masyarakat tetap akan meningkat pada libur panjang tersebut. Hanya saja, pengalaman dua kali libur panjang, selalu disertai peningkatan kasus Covid-19, sehingga menjadi perhatian tersendiri.

Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono MSc memberikan tips supaya liburan aman dari penularan Covid-19.

"Yang jelas hindari percikan air liur saat berbicara. Penyebaran Covid-19 melalui droplet, dari percikan air liur saat berbicara. Karenanya masyarakat diminta pakai masker dan jaga jarak serta menghindari kerumunan agar tidak terpapar Covid-19," ujar Tri Yunis Miko Wahyono sebagaimana dipublikasikan Satgas Covid-19, Kamis (22/10).

Dijelaskan pula bahwa masker berbahan kain hanya melindungi 70 persen, sedangkan masker bedah 80-90 persen, dan masker paling aman jenis N95.

Berikutnya, hindari kerumunan yang menyebabkan tak ada jarak. Pilih daerah wisata yang tidak terlalu padat, untuk menghindari potensi penularan.

"Perhatikan status zonasi lokasi wisata yang bakal dituju. Sebaiknya ketahui lebih awal, apakah statusnya zona hijau, kuning, oranye, atau merah, dengan mengunjungi laman resmi Covid-19 atau menanyakan langsung ke kantor pemerintahan setempat. Sebaiknya, pilih lokasi hiburan di zona hijau yang relatif lebih aman," pesannya.

Selanjutnya, pastikan lokasi hiburan itu di tempat terbuka seperti pantai atau wisata pegunungan (outdoor). Hindari ruangan tertutup yang tidak masuk cahaya matahari dan udara. Sedangkan dari faktor pribadi, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit atau sehat sebelum memutuskan berangkat liburan. Jika kondisi fisik bermasalah sebaiknya tunda perjalanan dan lebih baik mencari hiburan di dekat rumah dengan jarak terjangkau.

"Kunci yang adalah menghindari penularan melalui droplet. Makanya harus memakai masker yang melindungi hidung dan mulut," katanya. (San)-d

TINGKATKAN DAYA BELI

Perkuat Perlindungan Sosial-UMKM

JAKARTA (KR) - Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Inflasi tahun 2020 harus dipertahankan agar tidak terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan, agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi," tandas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (22/10).

Menurut Presiden, kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan kepada daya beli masyarakat dan para produsen, khususnya pelaku UMKM di sektor pangan.

Pemerintah Daerah pun diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terutama, belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya sektor UMKM. (Sim/Lmg)-f

WAPRES MENDORONG

Pesantren Punya Bank Wakaf Mikro

JAKARTA (KR) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Hari Santri Nasional yang diperingati pada setiap tanggal 22 Oktober adalah wujud penghormatan atas jasa para santri dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dan, peringatan Hari Santri menjadi momentum untuk terus menjaga persatuan dan menguatkan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini dan masa depan.

"Semoga keteladanan para santri dan jihad cinta Tanah Air menjadi semangat yang nyalakan cita-cita kita untuk terus gotong royong membangun Indonesia," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10).

Puan mengungkapkan, Hari Santri Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 didasarkan pada fatwa resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Resolusi Jihad merupakan fatwa yang dicetuskan KH. Hasyim Asy'ari bersama kiai-kiai lainnya untuk merespons pertanyaan Presiden Soekarno mengenai hukum membelah Tanah Air.

"Semangat ini harus kita kuatkan kembali, yakni kebersamaan menghadapi

pandemi Covid-19. Kami di DPR RI berharap para santri mau dan mampu berperan sebagai agen perubahan," ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Puan mengharapkan, semua elemen masyarakat harus bergotong-royong untuk dapat menghadapi pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya adalah para santri yang menjadi elemen penting menjaga nilai-nilai gotong royong menghadapi persoalan tersebut. "Seluruh elemen masyarakat, termasuk para santri, menjadi faktor penting dalam mengendalikan kasus Covid-19," ungkapnya.

Puan menyampaikan, DPR RI berkomitmen mendukung pesantren melalui fungsi dan tugasnya. Salah satu produk legislasi yang diharapkan dapat mendukung jalannya proses pendidikan di pesantren adalah Undang-Undang tentang Pesantren, untuk itu pemerintah didorong segera menerbitkan aturan turunan undang-undang tersebut.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Hari Santri berpesan agar pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan, dakwah serta pemberdayaan ekonomi rakyat. (Sim)-f

JAKSA TOLAK PK TOPAN SATIR

Sidang Dilanjutkan Pemeriksaan Bukti Baru

YOGYA (KR) - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak Gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi Topan Satir, mantan Direktur Utama PT Anidya Mitra Internasional (AMI). Menurut Jaksa tidak ada bukti baru (novum) dan Keputusan Pengadilan Tipikor PN Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Yogya hingga MA telah sesuai.

"Terdakwa sudah menjalani hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap ditambah harus membayar kewajiban denda, uang pengganti. PK dengan bukti baru (novum) yang diajukan tidak bisa diterima," tegas JPU I Wayan Wahyudisatra didampingi JPU Ernawati SH dan Tri Widhi SH, Kamis (22/10).

Sidang yang menghadirkan terdakwa secara virtual (daring) ini kemudian ditunda 2 minggu ke depan untuk pemeriksaan bukti-bukti baru yang akan disampaikan tim penasihat hukum terdakwa dengan koordinator Deddy Suardi SH.

Seperti diberitakan sebelumnya, Topan Satir mengajukan upaya hukum terakhir dengan Peninjauan Kembali (PK) menyusul vonis kasasi Mahkamah Agung pada Maret 2018 dengan pidana 4 tahun penjara, denda Rp 200.000.000 subsidi 6

bulan dan Uang Pengganti Rp 439.715.504 subsidi kurungan 1 tahun.

Vonis itu menguatkan vonis Pengadilan Tinggi DIY (Januari 2017) yang menyatakan, terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Juncto pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perbuatan itu dilakukan tahun 2006 dengan merealokasikan anggaran yang danya bersumber dari Tambahan Modal Pemda DIY Rp 3,2 miliar tanpa persetujuan Gubernur DIY. Dari jumlah tersebut Rp 1,2 miliar digunakan untuk proyek Buffer Stock tahun 2007, sehingga menimbulkan kerugian Rp 856.874.164.

"Sebagai pengacara terdakwa, kami menilai pertimbangan putusan kasasi telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Karena itu kami ajukan PK disertai novum (bukti baru)," ujar Deddy.

Deddy mengungkapkan, dalam RUPS yang dihadiri langsung Gubernur, bertanggung jawaban Direksi termasuk di dalamnya kebijakan realokasi anggaran dengan persetujuan Komisaris telah diterima dan disetujui. (R-4)-d

MEDIA WORKSHOP BPJS KESEHATAN JKN-KIS Sangat Membantu Masyarakat



■ Narasumber Media Workshop Berbasis Virtual BPJS Kesehatan Sesi 1

YOGYA (KR) -- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu dijaga keberlangsungannya apalagi di era pandemi Covid-19 ini masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

"Banyak warga masyarakat yang terbantu JKN-KIS dari BPJS Kesehatan karena sakit bisa terjadi kapan saja dan tanpa rencana. KIS bukanlah kartu untuk masyarakat miskin, tetapi untuk seluruh peserta program JKN," tegas Staf Menteri Keuangan RI Yustinus Prastowo saat Media Workshop Berbasis Virtual, Kamis (22/10) dalam rangkaian Anugerah Lomba Jurnalistik 2020.

Yustinus menyebutkan penyelenggaraan JKN-KIS juga mendapat pengawasan dan kontrol dari lembaga berkompeten dan masyarakat. "Dalam 7 tahun diselenggarakan JKN-KIS sudah mampu mengcover 90 penduduk Indonesia, tahun 2022 target sudah tidak membebani APBN," tegasnya.

Workshop ini mengundang perwakilan awak media yang tersebar di seluruh wilayah kantor BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual zoom.

Di Yogya workshop berlangsung di Aula BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Jalan Gedongkuning Yogya. Workshop selama 2 hari, Kamis (22/10) hari pertama untuk media cetak dan Jumat (23/10) hari kedua, untuk media online. Pelaksanaan kegiatan dengan prosedur kesehatan Covid-19.

Yustinus Prastowo hadir sebagai pembicara Sesi 1 pagi hari dengan

Tema "Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS bersama narasumber lainnya, Prof Hasbullah Thabrany (Chief Party, USAID Health Financing Activity), Kunto Ariawan (Kasatgas Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedepuitan Pencegahan KPK), Adang Bachtiar - (Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya), dan Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik) yang dilanjutkan sesi tanya jawab, diskusi dengan awak media melalui Slido.com

Dilanjutkan, siang harinya sesi 2

dengan tema Peran Jaminan Sosial Kesehatan di Era Covid-19 menghadirkan narasumber TB A Choesni (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial), Prof Budi Hidayat (Pakar Asuransi Kesehatan), Raden Pardede (Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Wartawan antusias mengikuti workshop karena sangat membantu dalam tugas jurnalistik dengan data dan pernyataan resmi yang mengedukasi. (R-4)



■ Narasumber Media Workshop Berbasis Virtual BPJS Kesehatan Sesi 2 dengan daring



■ Suasana Workshop Media Cetak di BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta 1